



EDUKASI PENULISAN *POLICY BRIEF* DALAM UPAYA PENINGKATAN PEMAHAMAN TERKAIT STRATEGI PENGELOLAAN TAMBANG KOTA PALU DI STISIPOL PANCHA BHAKTI PALU

Yulizar Pramudika Tawil¹⁾, M. Kafrawi Alkafiah²⁾, Moh Alfa satangke³⁾

¹²³ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako, Kota Palu, Indonesia
email: Yulizarpramudika@gmail.com

Abstrack: Judul Pengabdian Masyarakat dilakukan adalah Pelatihan Eukasi Policy Brief dalam upaya peningkatan pemahaman terkait strategi pengelolaan tambang Kota Palu di Stisipol Panca Bhakti Palu. Policy Brief menjadi hal yang berkaitan dengan kebijakan. Keberadaan Policy Brief menjadi representasi pandangan analis terhadap suatu kebijakan yang dapat mempengaruhi tindakan aktor kebijakan. Policy Brief hadir sebagai dokumen singkat yang mengangkat isu-isu kebijakan yang berdasarkan fakta dan data. Policy Brief bertujuan sebagai bentuk penyaringan atau mensintesis bukti untuk mempengaruhi pemikiran dan tindakan aktor kebijakan dalam pengambilan keputusan. Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pelajaran di kalangan mahasiswa ilmu administrasi publik Stisipol Panca Bhakti Palu tentang pentingnya memiliki pemahaman perihal Policy Brief terkait isu pengelolaan tambang yang berada di Kota Palu, sasaran penyuluhan ini adalah mahasiswa yang mengambil konsentrasi Kebijakan publik sebanyak 20 orang. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilaksanakan secara tatap muka yakni memberikan penjelasan terkait Policy Brief khususnya isu-isu analisis kebijakan pertambangan di kota palu . Luaran yang diharapkan berupa publikasi di jurnal lokal dan sertifikat yang diberikan kepada seluruh peserta agar dapat digunakan sesuai kebutuhan.

Kata Kunci: *Policy Brief*, Latihan Penulisan.

Abstrack: *The title of the Community Service carried out is Policy Brief Eucation Training in an effort to increase understanding regarding Palu City mine management strategies at Stisipol Panca Bhakti Palu. Policy Brief is something related to policy. The existence of a Policy Brief represents an analyst's view of a policy that can influence the actions of policy actors. Policy Briefs are presented as short documents that raise policy issues based on facts and data. Policy Briefs aim to be a form of filtering or synthesizing evidence to influence the thinking and actions of policy actors in decision making. This service aims to provide understanding and lessons among public administration students of Stisipol Panca Bhakti Palu about the importance of having an understanding of Policy Briefs related to mining management issues in Palu City. The target of this counseling is 20 students who are concentrating on Public Policy. The method of implementing this service is carried out face to face, namely providing explanations related to the Policy Brief, especially mining policy analysis issues in the city of Palu. The expected output is publication in local journals and certificates given to all participants so they can be used as needed.*

Keywords: *Policy Brief, writing training.*

Received	Revised	Published
25 Oktober 2023	17 November 2023	20 November 2023

Pendahuluan

Ringkasan kebijakan atau yang biasa di kenal dengan *Policy Brief* adalah dokumen yang menyajikan alasan untuk memilih opsi kebijakan tertentu atau tindakan dalam kebijakan saat ini. *Policy Brief* dapat berfokus pada argumen langsung untuk adopsi

alternatif tertentu, untuk meyakinkan kelompok sasaran tentang pentingnya masalah yang ada dan kebutuhan untuk mengadopsi alternatif yang dipilih, dan kemudian memotivasi tindakan. Dalam hal ini, hasil dari tindakan baik pemerintah ini diharapkan dapat berkontribusi pada penerapan kebijakan pertambangan yang lebih efektif.

Di negara atau pemerintahan dengan tradisi literasi yang kuat, *Policy Brief* berperan penting sebagai media atau alat komunikasi yang berdampak signifikan pada proses pengambilan keputusan. Tradisi menulis yang kuat merupakan salah satu tumpuan penguasa sebelum terjun ke dunia politik. Sebaliknya, di negara atau pemerintahan yang tidak memiliki tradisi aktifitas literasi yang memadai, tulisan tidak cukup mempengaruhi penguasa dalam pengambilan kebijakan.

Eksistensi *Policy Brief* saat ini belum cukup familiar, bahkan banyak pejabat pemerintah, yang belum memahami fungsi dokumen kebijakan atau *Policy Brief* itu sendiri. Lembaga-lembaga di Indonesia masih jarang mempraktikkan penyusunan pedoman kebijakan dan menggunakannya sebagai bagian dari proses promosi kebijakan. Meskipun kegunaan kebijakan atau dokumen kebijakan belum maksimal dalam proses promosi politik, namun *Policy Brief* merupakan bagian penting dari sebuah siklus kebijakan publik.

Pada kegiatan pengabdian ini, secara khusus akan melatih mahasiswa untuk menyusun *policy brief* sebagai dokumen singkat yang menyajikan penemuan dan rekomendasi dari penelitian yang ditujukan kepada audiens non-pakar, dan merupakan alat untuk menyampaikan masukan terhadap suatu kebijakan khususnya kebijakan yang bertautan erat dengan isu-isu pertambangan yang berada di Kota Palu.

Metodelogi

Melalui kegiatan penyuluhan ini, Tim Pengabdi menggunakan metode *face to face* yakni dengan cara memberikan materi-materi pokok bahasan dan selanjutnya diikuti dengan praktek cara menggunakan outline yang akan di bagikan pada masing-masing peserta. Selain itu, Tim melakukan pemantauan selama proses kegiatan berlangsung bagi mitra yang belum paham mengenai materi bahasan, dengan mengarahkannya pada aspek yang belum dipahami, sehingga mitra dapat langsung mengetahui dan memahami materi serta tahapan yang diarahakan oleh pemateri. Sehingga nantinya pada saat mitra khususnya mahasiswa dapat belajar secara mandiri maupun berkelompok dalam menghasilkan produk atau *outline policy brief*.

Hasil Dan Pembahasan

Dengan pelatihan edukasi penulisan *Policy Brief* sebagai upaya penanaman konsep keilmuan yang terukur dan comprehensive terhadap perkembangan ilmu kebijakan secara praktis pada Stisipol Panca Marga Palu terbagi atas beberapa tahapan. Pada awalnya

pelatihan di laksanakan secara tatap muka atau (Luring) di aula bersama Stisipol. Sebelum pelaksanaanya, tim telah melakukan observasi lokasi pelatihan, permohonan izin dan melakukan beberapa koordinasi menjelang pelaksanaan pelatihan. Salah satu bentuk koordinasi yang di lakukan adalah penentuan peserta yang di pilih berdasarkan tingkat pemahaman atau nalar kritis yang bisa di sesuaikan nantinya pada materi-materi penalaran logis pada saat memecahkan kasus kebijakan publik terutama dalam isu tambang

Dalam pelaksanaan pelatihan, tim melakukan *briefing* terlebih dahulu terkait teknis pelaksanaan kegiatan nantinya. Agenda pelatihan diawali dengan sambutan ketua Prodi administrasi negara STISIPOL, setelah itu sesi pelatihan di mulai dengan memberikan edukasi penulisan *policy brief*, pemahaman isu, konstruksi berpikir, hingga Analisa konseptual pada isu tambang yang mendasar. Materi yang di susun telah di telaah oleh tim pengabdian dengan menggunakan metode-metode dan alat Analisa yang sesuai dengan isu tambang yang di angkat

Setelah pemaparan materi, tim membagi peserta menjadi 3 kelompok, hal ini di tujukan untuk membangun logika kritis peserta untuk memecahkan isu- isu spesifik terkait tambang di mulai dari pencemaran lingkungan, ganti rugi lahan hingga konflik di antara pemerintah dan pemilik tambang. Setiap kelompok di berikan porsi waktu berdiskusi selama 40 menit dan di lanjutkan dengan pemaparan hasil diskusi kelompok melalui ketua kelompok, dalam diskusi kelompok, peserta terlihat sangat antusias memberikan gagasan-gagasan kritis berdasarkan referensi-referensi ilmiah yang. Diskusi berjalan secara interaktif dan cukup alot jika ada beberapa gagasan yang di anggap perlu untuk di perdebatkan perihal efektifitas ruang komunikasi masyarakat yang terkena dampak oleh aktifitas pertambangan itu untuk di masukan dalam kerangka kebijakan yang lebih memperhatikan hak hidup masyarakat sekitar hingga jaminan ganti rugi lahan dari korporasi tambang. Dan akhirnya kelompok mengumpulkan *policy brief* masing- masing kepada Tim Pengabdian.



Gambar 1. Kegiatan sosialisasi di Stisipol Panca Bhakti palu

Kesimpulan

Terdapat perubahan pemahaman masyarakat mitra sebelum dilaksanakannya pelatihan dan sesudah dilaksanakannya pelatihan. Mahasiswa mulai mampu memberikan konseptual analisis Terdapat isu- isu tambang yang ada, hingga mahasiswa mampu membuat *policy brief* dalam waktu yang cukup singkat Mahasiswa mulai menaruh minat pada isu- isu kebijakan terutama dalam memahami setiap etape kebijakan publik yang dapat di rumuskan melalui *policy brief*.

Referensi

- Dwiyanto, Agus. 2012. Riset Kebijakan dan Cara Presentasi, Bahan Paparan. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara
- Kementerian Dalam Negeri RI. 2016. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- Lembaga Administrasi Negara RI. 2017. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Bagi Analis Kebijakan.
- Young, Eoin and Lisa Quinn. 2012. Writing Effective Policy Paper : A Guide for Policy Advisers in Central and Eastern Europe. Budapest : Open Society Institute and Local Government Public Service Reform.
- W. Utomo, Tri Widodo, dkk. Merancang Policy Brief : Bahan Ajar Diklatpim Tingkat I. Direktorat Pembinaan Diklat Aparatur : LAN-RI